PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN TANAH DATAR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat utuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
pada Jurusan Ekonomi Syari'ah Konsentrasi Akuntansi Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar

Oleh :

RESA INDRI ASTUTI
NIM.1530121004

JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Resa Indri Astuti
Nim	: 15301210094
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir saya yang berjudul **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar"** adalah benar karya saya sendiri dan bukan plagiat.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 22 Januari 2020

Saya yang Menyatakan

RESA INDRI ASTUTI
NIM. 15301210094

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Pembimbing skripsi atas nama **RESA INDRI ASTUTI, NIM 15301210094** dengan judul, **" PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN TANAH DATAR "** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 20 Januari 2020

Ketua Jurusan
Ekonomi Syari'ah

Gampito, Se., M.si
NIP. 19670219200501 1 005

Pembimbing

Dr. H. Rizal, M.ag
NIP. 19731007 200212 1 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar

Dr. Ulya Aisani, SH., M.Hum
NIP. 19730303 199903 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **RESA INDRI ASTUTI, NIM. 15301210094,** dengan judul **"PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN TANAH DATAR"** telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Ekonomi Syariah

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Rizal, M.Ag NIP. 197310072002121001	Lektor Kepala		05/02-2020
2	Gampito, SE., M.Si NIP. 196702192005011005	Lektor		05/02 2020
3	Revi Candra, S.Pd., M.Ak NIP. 198702242018011001	Asisten Ahli		04/02 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar

Dr. Ulya Atsani, SH., M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

Resa Indri Astuti. NIM 15301210094. Judul Skripsi **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar.** Program Sarjana Ekonomi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi.

Populasi dalam penelitian ini adalah data PAD, DAU, DAK dan Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Tanah Datar tahun 2013-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar berupa laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan Statistik Kabupaten Tanah Datar. Teknik analisis yang digunakan adalah Uji Hipotesis Regresi Ordinal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. (2) Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (4) Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh sigifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Produk Domestik Regional Bruto.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

ABSTRAK ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Batasan dan Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 8

F. Definisi Operasional 9

BAB II KAJIAN TEORI **12**

A. Landasan Teori 12

1. Pendapatan 12

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 12

3. Dana Alokasi Umum (DAU) 13

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) 13

5. Pertumbuhan Ekonomi 14

B. Kajian Penelitian Relevan 33

C. Kerangka Berfikir 35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 38
A. Jenis Penelitian 38
B. Waktu dan Tempat Penelitian 38
C. Sumber Data 38
D. Populasi dan Sampel 39
E. Teknik Pengumpulan Data 40
F. Teknik Analisis Data 40
BAB IV HASIL PENELITIAN 45
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 45
1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar 45
2. Visi dan Kabupaten Tanah Datar 45
3. Kondisi Geografis Umum Kabupaten Tanah Datar 50
4. Pemerintahan 51
5. Keuangan 56
B. Statistik Deskriptif Penelitian 57
C. Pengujian Hipotesis Regresi Ordinal 59
1. Uji Keberartian Model 59
2. Uji Kesesuaian Model 60
D. Pembahasan Hasil Penelitian 70
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi 70
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi 72

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi 74
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi 78

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir 36

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2013-2018 57
Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Uji Keberartian Model Variabel Penelitian 60
Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Uji Kesesuaian Model Variabel Penelitian 60
Tabel 4. 4 Hasil Pengujian Tabel *Pseudo R-Square* Variabel Penelitian 61
Tabel 4. 5 Hasil Pengujian *Tabel Parameter Estimates* Variabel Penelitian 62
Tabel 4. 6 Hasil Pengujian *Tabel Test of Parallel Lines* Variabel Penelitian 63

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan desentralisai fiskal tertuang dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Diberlakukannya UU tersebut memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kebijakan tersebut akan berdampak pada luasnya hak, kewenangan dan kewajiban yang di miliki daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat. Dengan adanya kewenangan urusan pemerintahan yang bagitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat merupakan berkah bagi daerah, namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Desentralisasi fiskal dapat memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, namun di sisi lain dapat memunculkan persoalan baru, hal ini dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya, di samping mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan daerah lain dalam mencapai cita-cita otonomi daerah (Tahar & Zakhiya, 2011, p. 88).

Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dapat di katakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode ke periode berikutnya. Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat di artikan perkembangan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Pengertian ini terdapat tiga aspek yang ditekankan yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Aspek ketiga adalah perspektif jangka panjang. Suatu perekonomian tumbuh dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, dua puluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih lama lagi.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya dan secara mikro dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto per kapitanya (Siagian & Djazari, 2018, p. 3).

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar ataukah lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau dalam perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang di hasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah.

PDRB dalam stastistik disajikan dalam dua penilaian, yaitu PDRB atas harga berlaku (*at current market*) dan PDRB atas dasar harga konstan (*at constant market price*). PDRB atas harga berlaku (*at current market*) yaitu PDRB merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan yang memasukkan faktor inflansi di dalamnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (*at constant market price*) yaitu PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Berikut adalah data PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Tanah Datar tahun 2013-2018 :

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013-2018

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)
2013	7.139.449,24
2014	7.552.749,7
2015	7.955.069,56
2016	8.355.071,58
2017	8.783.098,09
2018	9.229.407,27

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah(2019)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Tanah Datar yang berdasarkan keterangan sebelumnya menjelaskan bahwa PDRB adalah gambaran dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Dengan adanya pemberlakuan desentralisasi fiskal diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah karena setiap kepala daerah memiliki kebebasan untuk mengelola segala potensi yang ada

di daerahnya. Untuk menunjang hal tersebut maka setiap kepala daerah harus meningkatkan sumber pendapatan daerah dan dana perimbangan. Namun setiap daerah mempunyai pendapatan asli yang berbeda maka peranan dana perimbangan sangat diperlukan yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sumber penerimaan daerah ini di harapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan hasil penerimaan daerahnya untuk pembiayaan kegiatan pembangunan, oleh karena itu peningkatan PAD, DAU dan DAK selalu di upayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, dan peningkatan PAD, DAU dan DAK tersebut harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah (Siagian & Djazari, 2018, p. 3).

Menurut UU No. 25 tahun 1999, PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari potensi sumber daya yang ada di daerah. PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Siswiyanti, 2015, p. 3).

Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang di miliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD (Wandira, 2013, p. 2).

PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan. Setiap daerah dalam hal ini perlu dan jeli

dalam membudayakan sumber potensi keuangan setempat. Agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang memang salah satu kriteria dalam pemantapan otonomi daerah. Kesempatan yang diberikan untuk mengelola sumber pendapatan daerah khususnya mengelola pendapatan asli daerah dan merupakan salah satu tujuan pembangunan otonomi daerah untuk menciptakan kemandirian suatu daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri dan juga usaha suatu daerah untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat atas subsidi. Dengan adanya kemandirian tersebut, maka suatu daerah bebas menggunakan pendapatan asli daerah tersebut untuk pendanaan pembangunan daerah, karena pembangunan merupakan langkah yang harus ditempuh untuk mengembangkan seluruh potensi daerah yang di lakukan secara berencana untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas msumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut (Siagian & Djazari, 2018, p. 4).

Selain PAD sumber pendapatan daerah lainnya yaitu Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) . Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat mengeluarkan dana perimbangan berupa dana alokasi umum untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur yang ada pada setiap daerah agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata. DAU merupakan sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah, DAU bisa didistribusikan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antar daerah baik horizontal maupun vertikal (Dewi & Suputra, 2017, p. 1747).

Dana perimbangan selanjutnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang No. 33 tahun 2004). Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK di arahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut di harapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang di realisasikan dalam belanja modal (Wandira, 2013, p. 45).

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2013-2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Alokasi Umum (Rp)	Dana Alokasi Khusus (Rp)	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2013	63.106.402.076	587.104.249.000	53.771.930.000	7.139.449,24	5.85
2014	62.198.189.442	650.563.368.000	60.905.780.000	7.552.749,7	5.79
2015	97.333.895.142	667.139.623.000	64.777.260.000	7.955.069,56	5.33
2016	115.232.849.849	707.992.904.000	384.290.380.620	8.355.071,58	5.03
2017	128.397.031.000	707.992.904.000	261.460.822.000	8.783.098,09	5.12
2018	152.110.032.440	695.555.754.000	273.243.829.000	9.229.407,27	5.08

Sumber : APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013-2018

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Pedapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013 sampai tahun 2018 setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Seperti terlihat pada tabel di atas persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar yang telah dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan dari 5.85%

menjadi 5.79%. Selanjutnya dari tahun 2014 ke tahun 2015 juga mengalami penurunan dari 5.79% menjadi 5.33%. Selanjutnya dari tahun 2015 ke tahun 2016 juga mengalami penurunan dari 5.33% menjadi 5.03%. Lalu hanya persentase pertumbuhan ekomi dari tahun 2016 ke tahun 2017 yang mengalami peningkatan yaitu dari 5.03% menjadi 5.12%.

Berdasarkan uraian permasalahan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar "**

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang akan di teliti yaitu**:**

1. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar selama 4 tahun selalu menurun.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar .
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar.
4. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar.
5. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar.
6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi dan merumuskan permasalahan ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar?
2. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar?
3. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar?
4. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian
   a. Bagi Penulis
      1) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

2) Sebagai wadah untuk aplikasi teori-teori yang telah di peroleh di perkuliahan dan di jadikan sebagai alat dalam pembahasan.

b. Bagi pihak akademik

1) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat sebagai dasar penelitian selanjutnya.
2) Sebagai tambahan wacana akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

c. Bagi Pemeritah Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi masing-masing pemegang kebijakan, terutama Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar didalam mengelola daerahnya.

2. Luaran Penelitian

Adapun luran penelitian dari penelitian ini adalah dapat di terbitkan pada jurnal ilmiah dan menambah khazanah perpustakaan IAIN Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat di artikan perkembangan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Meningkatkan produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai *Produk Domestik Bruto* (PDB) setiap tahunnya dan secara mikro dilihat dari *Produk Domestik Regional*

Bruto (PDRB) perkapitanya. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari potensi sumber daya yang ada di daerah. PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD di dapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang di pisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam hal ini memperlihatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kabupaten Tanah Datar.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

   Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam hal ini memperlihatkan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Tanah Datar.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

   Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam hal ini memperlihatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Tanah Datar.

Secara keseluruhan yang penulis maksud dengan penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan ekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa meningkat dan kemakmuran

masyarakat meningkat. Dalam hal ini peningkatan perekonomian suatu daerah dapat terjadi sebagai akibat dari peningakatan sumber pembiayaan yang di peroleh daerah berupa pedapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dan alokasi khusus (DAK) daerah tersebut. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari potensi sumber daya yang diperoleh daerah, dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah, dan dana alokasi khusus (DAK) juga merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pendapatan

Menurut FASB (1980) dalam SFAC No. 6 pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan asset suatu entitas atau penurunan hutang (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi barang. Penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung secara terus menerus dari entitas tersebut.

Menurut PSAK No. 23 pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitias normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari penanaman modal.

Pengertian lain juga dikemukakan oleh APB *(Accounting Principle Board)* Statement No. 4. Menurut APB pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan asset suatu entitas atau penurunan hutang(atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung secara terus menerus (Ikhsan & dkk, 2018, p. 268).

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 PAD adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari PAD adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Tahar & Zakhiya, 2011, p. 89).

Sumber-sumber PAD meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan

daerah lainnya yang di pisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain mengelola penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri, pemerintah daerah juga menerima dan mengelola dana yang bersumber dari APBN pemerintah pusat (Siswiyanti, 2015, p. 1).

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu di tetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang di tetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Tahar & Zakhiya, 2011, p. 90).

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang No. 33 tahun 2004). Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus di tanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK di arahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut di harapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang di realisasikan dalam belanja modal (Wandira. 2013. p.45).

5. Pertumbuhan Ekonomi

a. Defenisi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Gampito (2016:28) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggamabarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tanpa disertai dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut, yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.

Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan output (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat tabungan. Sedangkan menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi adalah merupakan istilah bagi negara yang telah maju menyebut keberhasilan pembangunannya, sementara itu negara sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi umumnya dalam bentuk persentase dan bernilai positif, tetapi juga mungkin saja bernilai negatif(misalnya saja pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998 minus sekitar 4%-6%). Negatifnya pertumbuhan ekonomi tentu saja disebabkan adanya penurunan yang lebih besar dari pendapatan nasional tahun berikutnya dibandingkan tahun sebelumnya (Putong, 2010, p. 281).

b. Sumber-Sumber Pertumbuhan

Menurut Tulus dalam Gampito (2016:31) pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan permintaan agregat atau pertumbuhan penawaran agregat. Dari sisi permintaan agregat, peningkatannya didalam ekonomi bisa terjadi karena PN, yang terdiri atas permintaan masyarakat(konsumen), perusahaann dan pemerintah yang meningkat. Dari sisi penawaran agregat, pertumbuhan output

bisa disebabkan oleh peningkatan volume dari faktor-faktor produksi yang digunakan, seperti tenaga kerja, modal(kapital), tanah dan energi.

c. Teori-Teori dan Model-Model Pertumbuhan Ekonomi

1) Teori Klasik

Menurut Gampito (2016:31) dasar pemikiran teori klasik adalah pembangunan ekonomi dilandasi oleh sistem liberal, yang mana pertumbuhan ekonomi dipacu oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Menurut Tulus (2011:44) jika keuntungan meningkat, tabungan akan meningkat, dan investasi juga akan bertambah. Hal ini akan meningkatkan stok modal yang ada. Skala produksi meningkat dan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja sehingga tingkat upah juga meningkat. Yang terakhir ini selanjutnya mengakibatkan jumlah suplai tenaga kerja meningkat yang akhirnya akan menurunkan tingkat produktivitas dan keuntungan karena berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang *(diminishing return)* karena terbatasnya Sumber Daya Alam (SDA), seperti luas tanah. Proses ini selanjutnya mengakibatkan produksi, permintaan tenaga kerja dan juga tingkat upah menurun.

Beberapa orang teori tokoh klasik, diantaranya :

a) Adam Smith

Menurut pandangan Adam Smith, kebijakan *laissez-faire* atau system mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat. Mengenai faktor yang menentukan pembangunan, Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meninggikan tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan

ekonomi akan bertambah tinggi. Perkembangan spesialisasi dan pembagian pekerjaan diantara tenaga kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan tekhnologi. Spesialisasi yang bertambah tinggi dan pasar yang bertambah luas akan menciptakan tekhnologi dan mengadakan inovasi (pembaruan). Maka, perkembangan ekonomi akan berlangsung lagi dan dengan demikian dari masa ke masa pendapatan per kapita akan terus bertambah tinggi (Sukirno, 2010, p. 244).

Didalam teori ini, faktor penentu proses produksi/pertumbuhan yaitu SDA, SDM, barang modal. Adam Smith memaparkan tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memandang kepada :

(1) Adanya hukum alam. Ia sangat percaya dengan prinsip bahwa hanya individu sendirilah yang tahu akan kebutuhannya, tidak orang lain apalagi pemerintah. Ia beranggapan bahwa adanya kekuatan yang tidak kentara *(invisible hand)* menyebabkan setiap perekonomian akan memperlakukan individu sesuai dengan harapannya. Jadi bila semua orang dibebaskan berusaha, maka akan memaksimalkan kesejahteraan mereka secara agregat.
(2) Peningkatan daya produktivitas tenaga kerja berhubungan dengan meningkatkan keterampilan kerja, penghematan waktu dalam meproduksi barang dan penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Kesemuanya itu berasal dari pembagian kerja.
(3) Proses penumpukan (akumulasi) modal. Menurutnya, proses akumulasi modal meningkat seiring dengan meningkatnya tabungan, dan dari tabunganlah akan

semakin tinggi dan berdampak pada penyediaan modal yang semakin banyak untuk investasi.

(4) Tingkat keuntungan akan semakin menurun manakala tingkat persaingan semakin tinggi. Padahal persaingan berasal dari kemampuan investasi yang memajukan perekonomian. Pada masa ini tingkat suku bunga akan semakin menurun karena meningkatnya kemakmuran, kesejahteraan dan jumlah penduduk bertambah. Akibat dari ini maka cadangan modal semakin besar sehingga investasi semakin murah dan akan berdampak pada semakin murahnya produksi.

(5) Petani, pengusaha dan produsen adalah merupakan agen pertumbuhan dalam perekonomian. Bila pertanian meningkat maka usaha induistri dan perniagaan semakin meningkat dan tentu saja akan memberikan dampak yang bagus bagi perekonomian karena adanya rantai kebutuhan dan kepentingan.

(6) Proses pertumbuhan bersifat menggumpal (mengakumulatif), setiap peningkatan dibidang pertanian maka aka nada peningkatan dibidang industri dan perniagaan dan seterusnya sampai terjadi kelangkaan sumber daya sehingga perekonomian mengalami kondisi stasioner (Putong, 2010, p. 284).

b) David Ricardo

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh SDA (dalam arti tanah) yang terbatas jumlahnya, dan jumlah penduduk yang menghasilkan tenaga kerja yang menyesuaikan tingkat upah, diatas atau dibawah tingkat upah alamiah (atau minimal). David Ricardo juga melihat adanya perubahan tekhnologi yang selalu terjadi, yang membuat

meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan memperlambat proses *diminishing return* kemerosotan tingkat upah dan keuntungan kearah tingkat minimumnya. David Ricardo juga melihat pertanian sebagai sektor utama sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2011, p. 44).

Menurut Ricardo, pola proses pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

(1) Pada permulaannya jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam relatif cukup banyak. Sebagai akibatnya, para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi. Karena pembentukan modal tergantung kepada keuntungan, maka laba yang tinggi akan menciptakan tingkat pembentukan modal yang tinggi pula. Ini akan mengakibatkan kenaikan produksi dan pertambahan permintaan tenaga kerja.

(2) Sesudah tahap tersebut, karena jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan bertambah, maka upah akan naik dan kenaikan upah ini mendorong pertambahan penduduk. Karena luas tanah tetap, maka makin lama tanah yang digunakan adalah tanah yang mutunya lebih rendah. Sebagai akibatnya, hasil tambahan yang diciptakan oleh seorang pekerja (produk marjinalnya) akan menjadi semakin kecil, karena lebih banyak perkerja yang digunakan. Dengan demikian, dengan terjadinya pertambahan penduduk yang terus-menerus, sewa tanah makin lama makin merupakan bagian yang cukup besar dari seluruh pendapatan nasional dan mengurangi tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha. Dorongan untuk mengadakan pembentukan modal menurun dan selanjutnya akan menurunkan permintaan atas tenaga kerja.

(3) Sesudah tahap tersebut, tingkat upah akan menurun dan pada akhirnya akan berada pada tingkat yang minimal. Pada tingkat ini perekonomian akan mencapai *stationary state*. Pembentukan modal baru tidak akan terjadi lagi karena sewa tanah yang sangat tinggi menyebabkan pengusaha tidak memperoleh keuntungan (Sukirno, 2010, p. 245).

c) John Stuart Mill

Menurut Sukirno (2010:249) Mill sependapat dengan Adam Smith bahwa spesialisasi atau pembagian kerja akan meninggikan keahlian pekerja, memperbaiki organisasi produksi, dan mendorong dilakukannya inovasi sehingga akan meninggikan tingkat produktivitas dan memperlancar pembangunan ekonomi. Mill berpendat jika penduduk terus-menerus bertambah, pembangunan ekonomi akan mengalami kemunduran dan pada akhirnya akan mencapai *stationary state*.

Salah satu dari beberapa sumbangan penting Mill pada analisis pembangunan ekonomi adalah mengenai peranan faktor-faktor bukan ekonomi terhadap pembangunan. Faktor-faktor tersebut adalah kepercayaan masyarakat, kebiasaan berpikir, adat istiadat, dan corak institusi yang ada.Mill berkeyakinan bahwa faktor-faktor tersebut merupakan faktor penting yang menyebabkan ketiadaan pembangunan di Asia.

Selanjutnya Mill berpendapat supaya pembangunan tercipta perlu ada golongan masyarakat yang kreatif, yang akan bertindak sebagai pencipta perubahan-perubahan. Tingkat pengetahuan suatu masyarakat merupakan faktor lain yang mempengaruhi pembangunan. Mill berpendapat bahwa pembangunan ekonomi tergantung pada dua jenis perbaikin:

perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang menghapuskan hambatan-hambatan pembangunan yang diciptakan manusia. Ia menekankan pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan ekonomi, karena menurut pendapatnya faktor tersebut memerankan dua fungsi penting dalam pembangunan ekonomi: meninggikan pengetahuan tekhnik masyarakat dan meninggikan pengetahuan umumnya. Faktor kedua yang dianggap lebih penting, yaitu karena pendidikan dapat menciptakan pandangan-pandangan dan kebiasaan-kebiasaan yang lebih modern atau rasioal, dan ini sangat besar peranannya untuk menentukan kemajuan ekonomi suatu masyarakat.

d) Thomas Robert Malthus

Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yaitu PNB potensialnya meningkat. Sektor yang dominan adalah pertanian dan industri. Jika output di kedua sektor tersebut ditingkatkan, maka PNB potensialnya akan bisa ditingkatkan. Ada dua kelompok faktor yang sangat menentukan pertumbuhan yaitu faktor-faktor ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi; dan faktor-faktor non-ekonomi seperti keamanan atas kekayaan, konsumsi dan hukum yang pasti, etos kerja dan disiplin pekerja yang tinggi.

Diantara faktor-faktor ekonomi tersebut, yang paling berpengaruh adalah faktor akumulasi modal. Tanpa penambahan modal (peningkatan investasi), proses produksi akan berhenti dan berarti PNB potensial akan berkurang atau hilang. Sumber utama akumulasi modal adalah keuntungan dari pengusaha, bukan penghematan konsumsi atau tabungan masyarakat (Tambunan, 2011, p. 44).

e) Marx

Marx membuat lima tahapan perkembangan sebuah perekonomian, yaitu: (a) perekonomian komunal primitif; (b) perekonomian perbudakan; (c) perekonomian feodal; (d) perekonomian kapitalis; (e) perekonomian sosialis. Titik kritis dari teori Marx ini adalah pada transisi dari perekonomian kapitalis ke perekonomian sosialis (Tambunan, 2011, p. 45).

Ada dua hal yang membedakan teori klasik dengan teori lainnya adalah :

(1) Faktor-faktor produksi utama adalah tenaga kerja, tanah dan modal.

(2) Peran tekhnologi dan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas tenaga kerja dan dari input-input produksi lainnya terhadap pertumbuhan output tidak mendapat perhatian secara eksplisit, atau dianggap konstan (tekhnologi dianggap suatu koefisien yang tetap tida berubah).

2) Teori Neo-Keynesian

Menurut Sukirno dalam Gampito (2017:32) teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisahan-pemisahan berikut : barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional, rasio modal produksi tetap nilainya, dan perekonomian terdiri dari 2 sektor.

Menurut Sukirno (2010:256) Harrod dan Domar tetap mempertahankan pendapat ahli-ahli ekonomi terdahulu yang menekankan peranan pembentukan modal dalam meciptakan petumbuhan ekonomi. Bagi kaum klasik, pembentukan modal adalah pengeluaran yang akan mempertinggi jumlah barang-

barang modal dalam masyarakat. Kalau kesanggupan tersebut bertambah, maka dengan sendirinya produksi dan pendapatan nasional akan bertambah tinggi dan pembangunan ekonomim akan tercipta. Bertambahnya barang-barang modal yang terdapat dalam masyarakat akan dengan sendirinya menciptakan pertambahan produksi nasional dan pembangunan ekonomi.

Dalam teori Harrod-Domar pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang, maupun sebagai pengeluaran akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Menurut Harrod-Domar pertambahan produksi dan pendapatan nasional bukan ditentukan oleh pertambahan kapasitas produksi, tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian, walaupun kapasitas produksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi tercipta apabila pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan kalau dibandingkan pada masa sebelumnya.

Untuk mewujudkan kenaikan pendapatan nasional dan untuk menciptakan pembangunan ekonomi, haruslah keseluruhan permitaan masyarakat bertambah. Karena dalam teori Harrod-Domar dimisalkan bahwa perekonomian tersebut terdiri dari dua sector, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, maka kenaikan pengeluaran masyarakat haruslah terjadi pada salah satu atau kedua sektor tersebut. Tetapi disamping itu, teori Harrod-Domar berpendapat bahwa konsumsi rumah tangga tergantung pada pendapatan nasional. Berarti pengeluaran rumah tangga hanya akan bertambah apabila pendapatan nasional meningkat. Dengan demikian, dalam suatu model ekonomi dua sector, pertambahan pendapatan nasional hanya tercipta dari pertambahah penanaman modal.

Model pertumbuhan dari Harrord-Domar (dikenal dengan sebutan H-O) adalah suatu gabungan denga modifikasi dari model pertumbuhan dari Domar dan model pertumbuhan dari Harrord. Model dari Domar lebih memfokuskan pada laju pertumbuhan investasi ($\Delta I/I$). Didalam modelnya investasi (I) ditetapkan harus tumbuh dalam suatu presentase yang konstan, sejak s *(marginal pronpency to save)*, yaitu rasio dari pertumbuhan tabungan domestic (S) terhadap peningkatan PDB (Y), dan ICOR *(incremental capital output ratio)*, yaitu rasio tambahan stok terhadap tambahan output ($(\Delta K/\Delta Y) = k$), kedua-duanya konstan. Jadi, formulasinya adalah sebagai berikut :

$$(\Delta I/I) = (1/ICOR)s \qquad (3.15)$$

Sedangkan penekanan dari model Harrord lebih pada pertumbuhan Y jangka panjang. Didalam modelnya, laju pertumbuhan keseimbangan (disebut: *warranted growth)* yang membuat besarnya S yang direncanakan ditetapkan selalu sama dengan besarnya I yang direncanakan. Asumsi-asumsinya adalah sebagai berikut :

- Hasrat menabung adalah bagian proporsional dari pendapatan nasional :

  $$s = S/Y \qquad (3.16)$$

- Tambahan kapital untuk satu periode tertentu besarnya sama dengan investasi yang ada :

  $$\Delta K = I \qquad (3.17)$$

- Seluruh tabungan tersalur dalam investasi netto :

  $$S = I = \Delta K \qquad (3.18)$$

  Sehingga :

  $$s = S/Y = I/Y \qquad (3.19)$$

- Maka, pertumbuhan dirumuskan sebagai berikut :

  $g = \Delta Y/Y = (\Delta Y/I)/(Y/I) = (I/Y)/(I/\Delta Y) = (S/Y)/(\Delta K/\Delta Y) = s/k$ (3.20)

  Persamaan (3.20) merupakan persamaan dalam model Harrord. Rumus dasar ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam satu kurun waktu akan tergantung pada tabungan (s) dan efesiensi kapital (k). Dengan demikian, jika laju pertumbuhan ekonomi ingin ditingkatkan, maka bisa dengan dua cara, yaitu meningkatkan tabungan (memperbesar s) dan meningkatkan efesiensi/ produktivitas kapital (memperkecil k).

  Dapat juga dikatakan analisis Harrod-Domar merupakan pelangkap kepada analisis Keynesian. Melalui analisis ini dapat diketahui bahwa dalam jangka panjang pertumbuhan pengeluaran agregat yang berkepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya mungkin dicapai apabila I+G +(X-M) terus menerus bertambah.

3) Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Menurut Sukirno (2010:264) dalam analisis teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik, permintaan masyarakat tidak menentukan laju pertumbuhan. Sebaliknya, menurut teori tersebut pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penawaran faktor-faktor produksi dan kemajuan tingkat tekhnologi. Dalam teori Harrd-Domar rasio modal produksi nilainya dianggap tetap. Sedangkan dalam teori neo-klasik rasio modal produksi dapat dengan mudah mengalami perubahan. Dengan perkataan lain, untuk menciptakan sejumlah tertentu produksi, dapat digunakan berbagai jumlah barang modal yang berbeda dan dikombinasikan dengan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula, dan sesuai

dengan yang diperlukan. Apabila modal yang digunakan lebih besar, maka lebih kecil tenaga kerja yang diperlukan. Sebaliknya, pabila modal yang digunakan lebih terbatas, maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan.

Sumbangan terpenting dari teori pertumbuhan neo-klasik adalah penemuan Abramovits pada tahun 1956 dan Solow pada tahun 1957 yang menunjukkan bahwa antara 80 sampai 90 persen pertambahan pendapatan perkapita dalam perekonomian Amerika Serikat dalam satu abad, yaitu pertengahan abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 bukan bersumber dari kenaikan stok modal. Kemajuan tersebut terutama disebabkan oleh perkembangan tekhnologi dan perbaiakan kemampuan tenaga kerja. Kenyataan ini merupakan bantahan terhadap keyakinan dalam teori pertumbuhan sejak masa Klasik yang menganggap bahwa pembentukan modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi.

Beberapa orang teori tokoh neo-klasik, diantaranya :

a) Model Pertumbuhan A. Lewis

> Model ini dikenal dengan sebutan suplai tenaga kerja yang tidak terbatas adalah satu model diantara model neo-klasik yang meneliti gejala di NB. Model ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi dimulai disebuah NB yang mempunyai dua sektor yang bersifat berbeda, yaitu pertanian tradisional yang subsisten dipedesaan dan industry yang modern diperkotaan. Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi terjadi karena pertumbuhan industri dengan proses akumulasi modal yang pesat, sedangkan pertanian pertumbuhannya relatif rendah dengan akumulasi kapital yang rendah sekali (Tambunan, 2011, p. 46).

Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi terjadi karena pertumbuhan industry dengan proses akumulasi modal pesat, sedangkan pertanian pertumbuhannya relatif rendah dengan akumulasi kapital yang rendah sekali. Keunggulan komparatif disektor industry adalah upah buruh yang rendah dikarenakan suplai tenaga kerja yang berlimpah dari pertanian, sehingga upah murah sekali, membuat rendahnya marjinal produktivitas tenaga kerja disektor tersebut, sehingga perpindahan tenaga kerja dari pertanian ke industri tidak sampai mengakibatkan turunnya produksi dipertanian (Gampito, 2016, p. 33).

b) Model Pertumbuhan W.W Rostaw

Menurut W.W Rostaw, pembangunan ekonomi dimanapun juga merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yaitu dari masyarakat terbelakang ke masyarakat maju. Proses ini, dengan berbagai variasinya, pada dasarnya berlansung sama dimanapun dan kapanpun juga (Gampito, 2016, p. 33).

Variasi yang ada bukan merupakan perubahan yang mendasar dari proses tersebut. Dalam modelnya, proses pembangunan terdiri atas lima tahapan, yaitu:

(1) masyarakat tradisional;
(2) prakondisi untuk lepas landas;
(3) lepas landas;
(4) menuju kedewasaan; dan
(5) era konsumsi massal tinggi.

Kriteria yang digunakan untuk membedakan tahap satu dengan tahap berikutnya adalah perubahan yang terjadi dalam kondisi ekonomi, sosial, politik, serta budaya dalam sebuah perekonomian (Tambunan, 2011, p. 47).

c) Model Pertumbuhan Solow

Dalam model Solow, proporsi faktor produksi diasumsikan dapat berubah jumlah kapital dan tenaga kerja atau rasio dari kedua faktor ini dalam sebuah proses produksi/produk tidak harus konstan, atau bisa saling mensubstitusi dan upah tenaga kerja dan suku bunga juga bisa berubah.

Jika jumlah tenaga kerja tumbuh melebihi jumlah stok kapital, upah akan turun relatif terhadap suku bunga. Atau sebaliknya, jika pertumbuhan kapital melebihi pertumbuhan partumbuhan tenaga kerja, maka suku bunga akan relatif terhadap upah (Gampito, 2016, p. 34). Fleksibilitas harga faktor prduksi ini memungkinkan jalur pertumbuhan dalam model ini bisa menjadi stabil. Berbeda dengam model H-O yang bisa mengalami ketidakstabilan yang berkepanjangan jika syarat-syarat untuk mencapai pertumbuhan *warranted* tidak terpenuhi. Model ini menganalisis pertumbuhan ekonomi (Y) dengan menggunakan fungsi produksi. Cobb-Douglas dengan dua faktor produksi, yaitu kapital (K) dan tenaga kerja (L) dapat tumbuh pada tingkat yang berbeda :

$$Y = K^{\alpha}(AL)^{\beta}$$

Dimana :

A = konstanta yang nilainya berbeda-beda untuk perekonomian yang berbeda

α dan β = elastisitas output terhadap kapital dan tenaga kerja

Dalam fungsi produksi Cobb-Douglas, $\alpha+\beta=1$, (atau $\beta=1-\alpha$), yang artinya bahwa peningkatan output sama persis dengan produktivitas fisik marginal dari kedua faktor produksi tersebut dikalikan dengan kenaikannya. Hal ini mengimplikasikan skala hasil yang konstan.

d) Model Pertumbuhan Paul A. Baran

Model ini dikenal sebagai teori pertumbuhanm dan stagnasi ekonomi. Pemikirannya sering disebut sebagai tesis neo-marxis, karena ia menolak pemikiran marxis yang menyatakan bahwa NB akan maju seperti di Eropa karena sentuhannya dengan negara-negara maju (NM) atau negara-negara kapitalis. Baran berpendapat bahwa akibat pengaruh dari NM, ekonomi NB akan menjadi buruk. Menurut Baran, proses kapitalisme di NB berbeda dengan yang terjadi di NM. Di NM, proses kapitalisme yang memakan waktu cukup panjang, mempunyai ciri-ciri :

(1) Pertumbuhan ekonomi (atau produksi) meningkat bersamaan dengan perpindahan masyarakat petani dari pedesaan ke industry perkotaaan;

(2) Peningkatan produksi barang dan jasa berbarengan dengan terjadinya pembagian dan spesialisasi kerja. Sebagian menjadi buruh dan sulit berkembang, dan sebagia lainnya menjadi kaya dan terus menumpuk kapital. Sedangkan di NB proses akumulasi modal tidak terjadi. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu modal asing yang dating dari NM ke NB justru mengambil surplus ekonomi yang terjadi, sehingga kapital yang ada justru mengambil surplus ekonomi yang terjadi , sehingga kapital yang ada justru berkurang dan masyarakat menjadi miskin karena tidak menikmati surplus tersebut.

e) Teori Ketergantungan Neo-Kolonial

Dasar pemikiran dari teori ini adalah pembangunan ekonomi di NB sangat tergantung pada NM, terutama dalam investasi lansung (PMA) dari impor barang-barang industri. Pekerja-pekerja di NB (disebut negara-negara

periferi/pinggiran) dipekerjakan sebagai buruh diperusahaan-perusahaan asing berlikasi dinegara NB disektor pertanian dan pertambangan, sementara semua kebutuhan produk-produk manufaktur, mulai dari barang-barang konsumsi hingga peralatan dan mesin industry diimpor dari NM (disebut negara-negara inti/pusat). Ini membuat NB hanya bisa berspesialisasi di produk-produk primer yang nilai tambahnya rendah, sementara NM berspesialisasi dalam produksi industri yang menghasilkan nilai tambah besar. Walaupun sekarang ini, sudah banyak NB yang berspesialisasi dalam industri manufaktur, namun ketergantungannya terhadap NM tetap tinggi, bahkan menjadi lebih tergantung terutama dalam pinjaman (ULN) dan tekhnologi (Tambunan, 2011, p. 47).

4) Teori Modern

Dalam teori modern, faktor-faktor produksi yang krusial tidak hanya banyaknya tenaga kerja dan modal, tetapi juga kualitas SDM dan kemajuan tekhnologi (yang terkandung didalam barang modal atau mesin), energi (khususnya energi alternatif) bahan baku dan mineral. Bahkan, dalam era globalisasi dan perdagangan bebas dunia saat ini, kualitas SDM dan tekhnologi merupakan dua faktor dalam satu paket yang menjadi penentu utama keberhasilan suatu bangsa dan negara. Selain itu faktor-faktor lain yang oleh oteori modern juga dianggap sangat berpengaruh, serta peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah (yang antara lain dicerminkan oleh besarnya pengeluaran pemerintah), birokrasi, dan dasar tukar internasional *(Terms of Trade,* ToT) (Tambunan, 2011, p. 49).

Dalam kelompok teori modern, kualitas kerja lebih penting dari pada kuantitasnya. Kualitas tenaga kerja tidak hanya dilihat dari segi tingkat pendidikan tetapi juga kondisi kesehatannya.

Sekarang ini tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan menjadi dua variabel bebas yang penting didalam analisis-analisis empiris dengan pendekatan ekonometris mengenai pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendidikan biasanya diukur dengan persentase tenaga kerja yang berpendidikan tinggi terhadap tenaga kerja, atau penduduk yang terdaftar dalam suatu tingkat pendidikan tertentu, misalnya pendidikan. Sedangkan tingkat kesehatan umumnya diukur dengan tinkat harapan hidup (Gampito, 2016, p. 35).

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Gampito (2016:36) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut :

1) Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan laut yang diperoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Didalam setiap negara dimana pertumbuhan ekonomi baru bermula terdapat banyak hambatan untuk mengembankan berbagai kegiatan ekonomi diluar sector utama (pertanian dan pertambangan) yaitu sektor dimana kekayaan alam terdapat.

Kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli dan kekurangan pengetahuan para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi modern disatu pihak, dan terbatasnya pasar bagi berbagai jenis ekonomi (sebagai akibat dari pendapatan masyarakat yang sangat rendah) dipihak lain, membatasi kemungkinan untuk mengembangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi. Apaila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang

dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan yang baru saja dijelaskan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat.

2) Jumlah dan Mutu Dari Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memungkinkan negara itu menambah produksi. Disamping itu sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi. Hal ini akan menyebabkan produktifitas bertambah dan ini selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja. Selanjutnya perlu diingat pula bahwa pengusaha adalah sebagian dari penduduk.

Maka luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara juga bergantung kepada jumlah pengusaha dalam ekonomi. Apabila tersedianya pengusaha dalam sejumlah penduduk tertentu adalah lebih banyak, lebih banyak kegiatan ekonomi yang dijalankan.

3) Barang-Barang Modal dan Tekhnologi

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi koefisien pertumbuhan ekonomi, didalam masyarakat yang sangat kurang maju sekalipun barang-barang modal sangat besar perannya dalam kegiatan ekonomi karena dapat meningkatkan produktivitas. Tanpa adanya alat-alat untuk menangkap ikan dan berburu, alat-alat untuk bercocok tanam dan mengambil hasil hutan, masyarakat yang kurang maju akan menghadapi kesusahan yang lebih banyak lagi dalam mencari makanannya sehari-hari. Pada masa kini pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat yang tinggi, yaitu lebih modern daripada kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat yang masih belum berkembang.

Tanpa adanya perkembangan tekhnologi, produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang sangat rendah. Kemajuan tekhnologi dapat mempertinggi keefesienan kegiatan memproduksi suatu barang.

4) Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat peranannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, didalam menganalisis mengenai masalah-masalah pembangunan dinegara-negara berkembang ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan produktivitas yang tinggi. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat.

Apabila dalam masyarakat terdapat beberapa keadaan dalam sistem sosial dan sikap masyarakat yang sangat menghambat pertumbuhan ekonomi, pemerintah haruslah berusaha untuk menghapuskan hambatan-hambatan tersebut. Perombakan dalam sistem sosial, seperti misalnya menghapuskan kekuatan tuan tanah, adalah suatu langkah yang perlu dilakukan. Juga dalam perubahan sikap masyarakat diciptakan. Perubahan itu terutama harus ditujukan agar masyarakat bersedia bekerja lebih keras untuk mendapatkan pendapatan dan keuntungan yang lebih banyak. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memperluas fasilitas pendidikan dan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.

B. Kajian Penelitian Relevan

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi telah dilakukan. Di antara penelitian tersebut adalah:

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Saraswati dan Ardi Hamzah (2017) dengan judul: ” Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja Modal memperlemah pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Investasi Swasta memperkuat pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Saraswati dan Ardi Hamzah terdapat perbedaan dengan yang penulis lakukan yaitu penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran pada Provinsi Bali. Sedangkan penulis membahas mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi dan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pungky Siswiyanti (2015) dengan judul: ” Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap besarnya Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai positif, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap besarnya Pertumbuhan, Ekonomi dengan nilai positif, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap besarnya Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai negatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pungky Siswiyanti terdapat perbedaan dengan yang penulis lakukan yaitu penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening di provinsi Jawa Timur. Sedangkan penulis membahas mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi dan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2018) dengan judul: ”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan variabel pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal serta pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini terdapat perbedaan dengan yang penulis lakukan yaitu penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di kota Bukittinggi. Sedangkan penulis membahas mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonom Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suandi, Irmal (2016) dengan judul: ”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan variabel pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi khusus memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk *dummy* kota Makassar memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, *Dummy* kota Palopo memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, *Dummy* kota Pare-pare memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, *Dummy* kabupaten Selayar tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, *Dummy* kabupaten Bantaeng tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irmal Suandi terdapat perbedaan dengan yang penulis lakukan yaitu penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi dan *dummy* perbedaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan penulis membahas mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonom Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi dan terhadap pertumbuhan ekonomi.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah suatu model yang menerangkan bagaimana suatu teori dengan faktor-faktor yang penting telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap variable dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka kerangka penelitian yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sabagai berikut :

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

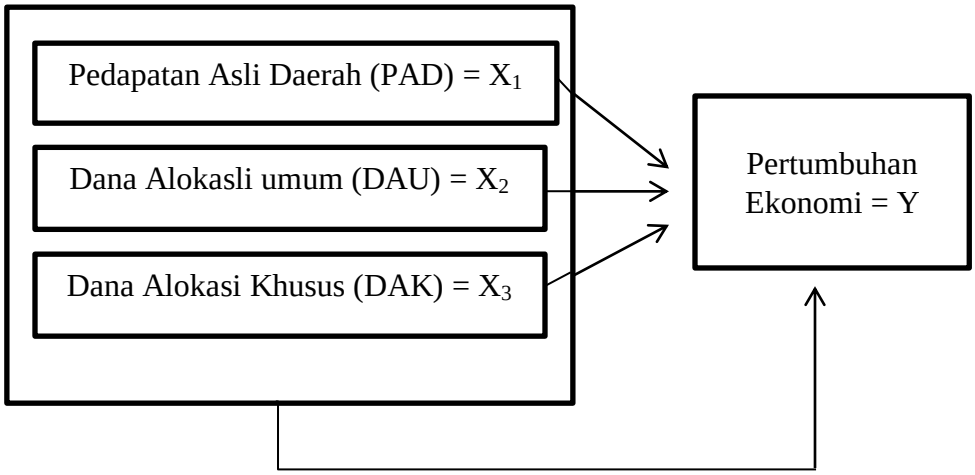

A. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teo*ritis* terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_1 : Pedapatan Asli Daerah(PAD) berpegangaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar.

H_2 : Dana Alokasi Umum(DAU) berpegangaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar.

H_3: Dana Alokasi Khusus(DAK) berpegangaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar.

H_4 : Pedapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK) secara bersama-sama berpegangaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah *Field Research* atau penelitian lapangan yaitu pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang), Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah. Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif memunculkan kesulitan dalam mengontrol variabel-vaeiabel lain yang dapat berpengaruh terhadap proses penelitian.

Untuk menciptakan validitas yang tinggi juga diperlukan kecermatan dalam proses penentuan sampel, pengambilan data dan penentu alat analisisya (Mulyadi, 2011). Kemudian penulis akan mengolahnya dengan menggunakan alat analisis tertentu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Sehingga penulis dapat mengetahui seberapa pengaruh pendapatah asli daerah, dana aloksi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Kabupaten Tanah Datar.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Juli – Februari 2019 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan pengambilan data yang dilakukan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Datar dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah.

C. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) dan Laporan Statistik Kabupaten Tanah Datar.

D. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen , 2018, p. 148). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah data PAD, DAU, DAK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2013-2018.

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua populasi yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiyono, 2018, p. 149).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil (Sugiyono, 2018, p. 156) . Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah seluruh data PAD, DAU, DAK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2013-2018.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data dari pemerintah daerah dan data lainnya yang terkait dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulis menggunakan analisa statistik, dengan menggunakan SPSS versi 22. Yang mengukur antara pengaruh variabel bebas *(independent variable)* dengan variabel terikat *(dependent variable).*

1) Variabel bebas *(Independent variable)*

   Menurut Sugiyono (2013:39) variabel bebas *(independent variable)* adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Variabel ini dalam notasinya seringkali diberi notasi X. Variabel bebas *(independent variable)* dalam penelitiannya adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

2) Variabel terikat *(Dependent variable).*

   Menurut Sugiyono (2013:40) variabel terikat *(dependet variable)* merupakan variabel yang dipengaruhi oleh keberadaan variabel bebas. Variabel ini dalam notasinya sering diberi notasi Y. Variabel ini merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi.

Adapun analisa statistik menggunakan SPSS versi 20, dengan alat uji sebagai berikut :

1. Statistik Deskriptif

   Menurut Sugiyono (2017:29) statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap

objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Menurut Prayitno (2014:30) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Uji Hipotesis Regresi Ordinal

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi ordinal. Regresi ordinal adalah analisis regresi dimana variabel terikatnya menggunakan skala ordinal. Sedangkan variabel bebasnya merupakan *Covariate* (jika menggunakan skala interval atau rasio) atau bisa merupakan factor (jika menggunakan skala nominal atau ordinal). Seperti halnya *Multinominal Logistic Regresion,*jika kategori variabel dependen berupa ordinal (peringkat) misalkan tingkat kesehatan bank yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat dimana sehat mempunyai peringkat lebih tinggi disbanding kurang sehat, maka analisis *logistic* harus menggunakan *ordinal regression* atau sering disebut juga dengan PLUM (Ghzali, 2006, p. 94) .

Prinsip yang digunakan dalam regresi ordinal adalah prinsip *general least square.* Prinsip *general least square* yaitu metode permodelan yang memprediksi probabilitas kumulatif dari kategori yang ada. Jenis regresi ordinal mempunyai beberapa teknik perhitungan yang mana pada SPSS disebut dengan *Option Llink,* jenis tersebut adalah sebagai berikut :

a) *Logit* dengan persamaan **F(x)=log(x/(1-x)**

Jenis ini digunakan pada sebagian besar distribusi data, maka aplikasi SPSS secara default atau bawaan aslinya menggunakan *Option Link* jenis logit ini.

b) *Negative log-log* dengan persamaan **F(x)=-log(-log(x))**
   Jenis ini digunakan apabila data mempunyai kecenderungan bernilai rendah.
c) *Complementary log-log* dengan persamaan **F(x)=log(-log(1-x))**
   Jenis ini digunakan apabila data mempunyai kecenderungan bernilai tinggi.
d) *Cauchit (Inverse Cauchy)* dengan persamaan **F(x)=tan(Phi(x-0,05))**
   Jenis ini digunakan apabila variabel laten mempuyai nilai ekstrem.
e) *Probit* dengan persamaan F**(x)=O-1(x)** dengan **O-1** adalah fungsi inverse distribusi komulatif standar normal

Semua jenis atau *Option Link* di atas tentu dipilih dengan menyesuaikan distribusi data yang ada. Dalam regresi ordinal jika variabel independen (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$\textbf{Logit(Y)} = \mathbf{a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3}$$

Keterangan :
Y = nilai prediksi variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi)
X = variabel independen
X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X2 = Dana Aloksi Umum (DAU)
X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)
a = konstanta, nilai Y jika x = 0
b = koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y

yang didasarkan variabel

Dibawah ini merupakan pembagian uji hipotesis regresi ordinal adalah sebagai berikut :

a) Uji Keberartian Model

Jika variabel independen dimasukkan kedala model, maka nilai 2loglikehood akan turun dan penurunan ini signifikan pada 0,01 yang berarti model variabel independen lebih baik disbanding model *intercept* saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model fit (Ghozali, 2006, p. 97).

b) Uji Kesesuaian Model

Uji kesesuaian model ini menunjukkan uji kesesuain model dengan data. Jika signifikansi besar dari 0,05 hal ini berarti model sesuai dengan data empiris dan layak digunakan. Tabel yang terkait dengan kesesuaian model adalah sebagai berikut (Ghozali, 2006, p. 98) :

i) Tabel *Pseudo-Square* menjelaskan variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam bentuk presentase.

ii) Tabel *Parameter Estimates* dilihat dengan berpedoman kepada nilai Wald dan nilai signifikasinya. Dasar pengambilan keputusan dalam tabel *parameter estimates* adalah jika nilai signifikansi masing-masing Wald pada variabel X < 0,05 berarti terdapat pengaruh terhadap variabel dependen dari masing-masing variabel independen, sedangkan jika nilai signifikansi masing-masing Wald pada variabel X > 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen dari masing-masing variabel independen.

iii) Tabel *Test f Parallel Lines* digunakan untuk asumsi bahwa semua kategori memiliki parameter yang sama atau tidak. Nilai yang

diinginkan adalah tidak signifikan yaitu > 0,05 yang berarti bahwa model cocok.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan suatu bentuk Pemerintahan Daerah yang merupakan Kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini merupakan Kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatera Barat. Selain itu Kabupaten Tanah Datar merupakan tujuh Kabupaten terbaik di Indonesia dari 400 Kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga Interasioal Partership dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan Otonomi Daerah.

Ibukota Kabupaten Tanah Datar berada di kota Batusangkar. Uniknya, Kota Batusangkar ini berada pada tiga wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, dan Sungai Tarab. Sedangkan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tanjung Emas atau tepatnya di Nagari Pagaruyung. Kota Batusangkar ini dijuluki sebagai Kota Budaya, karena kota Batusangkar merupakan pusat kebudayaan minangkabau, dimana di daerah Batusangkar dan sekitarnya terdapat banyak peninggalan sejarah dan prasasti dan juga terdapat Istano Basa Pagaruyung yang merupakan pusat Kerajaan Minangkabau.

2. Visi dan Kabupaten Tanah Datar

1. Visi Kabupaten Tanah Datar

Pada Pemerintah Daerah, dalam menjalankan semua aktivitas terkait dengan sistem pemerintahannya setiap pemerintahan mestinya mempunyai tujuan yang hendak dicapai, dengan dibuktikannya dalam

suatu visi untuk memperkuat tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah tersebut. Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga memiliki visi, sebagai tujuan dalam Pemerintah. Visi Kabupaten Tanah Datar sesuai RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahu 2016-2021 yaitu :*" Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Yang Madani, Berbudaya Dan Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".*

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kabupaten Madani

   Kabupaten Madani adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotifasi, berpartisipasi ,mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Kabupaten Berbudaya

   Kabupaten Berbudaya adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat, budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.

3) Kabupaten Sejahtera

   Kabupaten Sejahtera adalah suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman, aman, untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Sejahtera berarti juga dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan

keluarga pada umumnya, punya pekerjaan tetap yang menghasilkan dan semakin hari terus meningkat.

4) Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

2. Misi Kabupaten Tanah Datar

Dalam mencapai visi dari pemerintahan tersebut , Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menetapkan suatu bentuk misi dalam rangka mencapai tujuannya. Misi Kabupaten Tanah Datar yaitu :

1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya.

Tujuan dari misi ini adalah :

a) Meningkatkan nilainilai kehidupan yang islami, beradat dan berbudaya.

Adapun Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan ini adalah :

(1) Meningkatnya pemahaman ajaran agama di tengah-tengah masyarakat.

(2) Meningkatnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dan alim ulama dalam membina kehidupan beragama di masyarakat.

(3) Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya di tengahtengahmasyarakat.

(4) Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni danbudaya.

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas berkarakter dan sejahtera.

   Tujuan dari misi ini adalah :

   a) Meningkatkan kualitas pendidikan.

      Adapun sasaran yang hendak dicapai dari tujuan ini adalah :

      (1) Meningkatnya prilaku positif siswa, pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua.

      (2) Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan.

      (3) Meningkatnya mutu layanan dan lulusan serta tata kelola pendidikan.

   b) Meningkatkan kesadaran, kemauandankemampuanhidup sehat

      Adapun sasaran yang hendak dicapai dari tujuan ini adalah :

      (1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

   c) Meningkatkan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

      Adapun sasaran yang hendak dicapai dari tujuan ini adalah :

      (1) Meningkatnya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana.

   d) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

      Adapun sasaran yang hendak dicapai dari tujuan ini adalah :

      (1) Meningkatnya perlindunganterhadap perempuan dan anak.

   e) Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

      Adapun sasaran yang hendak dicapai dari tujuan ini adalah :

      (1) Meningkatnya peran serta dan partisipasimasyarakat dalam pembangunan.

   f) Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari tujuan ini adalah :

(1) Menurunnya jumlah pendudukmiskin dan pengangguran terbuka.

(2) Pemberdayaan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial.

3) Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Tujuan dari misi ini adalah :

a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraanpemerintahan.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari tujuan ini adalah :

(1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

(2) Meningkatnya transparansi informasi publik.

b) Meningkatkanharmonisasi dan rasa aman di tengah masyarakat

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari tujuan ini adalah :

(1) Meningkatnya penegakan dan kepastian hukum.

c) Mengoptimalkan kemampuankeuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari tujuan ini adalah :

(1) Meningkatnyakemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah.

4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Tujuan dari misi ini adalah :

a) Meningkatkan infrastruktur wilayah.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari tujuan ini adalah :

(1) Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, perumahan dan pemukiman.

b) Meningkatkan pengelolaan tata ruang, kelestarian lingkunganhidup dan sumber daya alam.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari tujuan ini adalah :

(1) Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang.

(2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam.

c) Meningkatkan pengelolaan penanggulangan bencana.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari tujuan ini adalah :

(1) Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana.

(2) Meningkatnya kesiagaan dalam penanggulangan bahaya kebakaran.

5) Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

a) Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari tujuan ini adalah :

(1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang mengandalkan produk unggulan dan potensi sumber daya daerah.

b) Menjadikan Tanah Datar sebagai tujuan wisata utama daerah dan nasional.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari tujuan ini adalah :

(1) Meningkatnya kunjungan wisatawan.

3. Kondisi Geografis Umum Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang dikenal sebagai “Luhak Nan Tuo” terletak pada 00°17” s.d. 00°39” LS dan 100°19” s.d 100°51” BT dengan luas 1.336,00 Km² yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Agam, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Solok.
- Sebelah Barat : Kabupaten Padang Pariaman.
- Sebelah Timur : Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto.

Secara geografis, daerah Kabupaten Tanah Datar berada disekitar kaki Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago, dan dilalui oleh 25 sungai. Daerah disekitar Danau Singkarak yang cukup luas dan sekitarnya sebagiannya merupakan daerah Kabupaten Tanah Datar yakni Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan.

Wilayah administasi Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong. Dilihat dari luas wilayah, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanjung Baru dengan luas 43,14 km². Sedangkan kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara, yakni 204,31 km², kemudian diikut Kecamatan X Koto yang luasnya 152,02 km².

4. Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu daerah otonom dituntut untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasa l12, dinyatakan bahwa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaanumum dan penataan ruang.
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5. Ketenteraman,ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.
6. Sosial.

Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

1. Tenaga kerja.
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pangan.
4. Pertahanan.
5. Lingkungan hidup.
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan.
10. Komunikasi dan informatika.
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah.
12. Penanaman modal.
13. Kepemudaan dan olah raga.
14. Statistik.
15. Persandian.
16. Kebudayaan.
17. Perpustakaan.
18. Kearsipan.

Disamping itu urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Pertanian.

2. Kehutanan.
3. Pariwisata.
4. Perikanan dan Kelautan.
5. Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Perdagangan.
7. Industri.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bupati Tanah Datar dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah tersebut terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga Sekretariat Daerah. Unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunandan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah dan unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar membentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

A. Perangkat Daerah
   1. SekretariatDaerah tipe A.
   2. SekretariatDPRD tipe B.
   3. Inspektorat Daerah tipe A.
B. Dinas Daerah, terdiri 10 Dinas tipe A, 5 Dinas tipe B dan 1 Dinas tipe C dengan rincian sebagai berikut:
   1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A yang menyelenggaarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
   2. Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggaarakan urusan pemerintahan bidang kesehataan.
   3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tipe A yang menyelenggaarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertaanahan.

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tipe A yang menyelenggaarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan bidang lingkungan hidup.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluaarga berencana.
9. Dinas Perhubungan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan persandian.
11. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan dan bidang energi dan sumberdaya mineral.
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

13. Dinas Pangan dan Perikanan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan.
14. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang pemuda dan bidang olahraga.
15. Dinas Pertanian Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
16. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindusterian dan Perdagangan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, bidang perindusterian dan bidang perdagangan.

B. Badan Daerah, terdiri dari 2 Badan tipe A dan 1 Badan tipe B dengan rincian sebagai berikut :
   1. Badan Perencanaan, Penelitian Pengembangan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan.
   2. Badan Keuangan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan.
   3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

C. Kecamatan,terdiri dari 14 Kecamatan dengan tipe A terdiri dari:
   1. Kecamatan X Koto.
   2. Kecamatan Batipuh.
   3. Kecamatan Rambatan.
   4. Kecamatan Lima Kaum.
   5. Kecamatan Tanjung Emas.
   6. Kecamatan Lintau Buo.
   7. Kecamatan Sungayang.

8. Kecamatan Sungai Tarab.
9. Kecamatan Pariangan.
10. Kecamatan Salimpaung.
11. Kecamatan Tanjung Baru.
12. Kecamatan Lintau Buo Utara.
13. Kecamatan Batipuh Selatan.

D. Staf Ahli

Staf Ahli terdiri dari 3 (tiga) orang, bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Datar, yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan hubungan kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

Untuk menggerakkan struktur organisasi Pemerintah Daerah berdasarkan urusan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2018 didukung oleh sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai penggerak roda Pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah.

5. Keuangan

Untuk menjalankan roda pembangunan di Kabupaten Tanah Datar selama ini terdapat tiga sumber penerimaan, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiga jenis pendapatan ini digunakan untuk belanja daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dalam rangka pembangunan daerah. Belanja daerah dapat dibedakan menurut belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasional terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan

dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap atau investasi seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung atau bangunan, infrastruktur fisik dan sejenisnya.

B. Statistik Deskriptif Penelitian

Statistik deskriptif menggambarkan deskripsi variabel-variabel independen dan dependen secara statistik dalam penelitian ini. Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) sedangkan variabel dependennya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Statistik deskriptif memberi gambaran atau deskripsi data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum. Berikut ini adalah uji statistik deskriptif variabel penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Statistik Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2013-2018

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	6	62,198,189,442.00	152,110,032,440.00	103,063,066,658.1667	36,041,128,909.27615
Dana Alokasi Umum	6	587,104,249,000.00	707,992,904,000.00	669,391,467,000.0000	46,466,043,839.95258
Dana Alokasi Khusus	6	53,771,930,000.00	384,290,380,620.00	183,075,000,270.0000	141,704,863,521.22098
PDRB	6	7,139,449,240,000.00	9,229,407,270,000.00	8,169,140,906,666.6670	777,394,107,128.59480
Valid N (listwise)	6				

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah yang di dapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang di pisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan hasil Uji Statistik Deskriptif pada Tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah sampel (N) sebanyak 6, rata-rata jumlah Pendapatan Asli Daerah (X_1) Pemerintah Kabupaten Tanah sebanyak Rp.103.063.066.658,1667 dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah terendah Rp.62.198.189.442 dan jumlah Pendapatan Asli Daerah tertinggi Rp.152.110.032.440 dengan Standar Deviasi Rp.36.041.128.909,27615 dari rata-rata.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan hasil Uji Statistik Deskriptif pada Tabel 4.1 diatas dapat dilihat, rata-rata jumlah Dana Alokasi Umum (X_2) Pemerintah Kabupaten Tanah sebanyak Rp. 669.391.467.000 dengan jumlah Dana Alokasi Umum terendah Rp. 587.104.249.000 dan jumlah Dana Alokasi Umum tertinggi Rp.707.992.904.000 dengan Standar Deviasi Rp.46.466.043.839,95258 dari rata-rata.

Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan hasil Uji Statistik Deskriptif pada Tabel 4.1 diatas dapat dilihat, rata-rata jumlah Dana Alokasi Khusus (X_3) Pemerintah Kabupaten Tanah sebanyak Rp.183.075.000.270 dengan jumlah Dana Alokasi Khusus terendah Rp.53.771.930.000 dan jumlah Dana Alokasi Khusus tertinggi Rp.384.290.380.620 dengan Standar Deviasi Rp.141.704.863.521,22098 dari rata-rata.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Meningkatkan produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai *Produk Domestik Bruto* (PDB) setiap tahunnya dan secara mikro dilihat dari *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) perkapitanya. Berdasarkan hasil Uji Statistik Deskriptif pada Tabel 4.1 diatas dapat dilihat, rata-rata jumlah PDRB Pemerintah Kabupaten Tanah adalah Rp.8,169,140,906,666.6670 dengan jumlah PDRB terendah Rp.7,139,449,240,000.00 dan jumlah PDRB tertinggi Rp. 9,229,407,270,000.00 dengan Standar Deviasi Rp. 777,394,107,128.59480 dari rata-rata.

C. Pengujian Hipotesis Regresi Ordinal

Prinsip yang digunakan dalam Regresi Ordinal adalah prinsip *general least square.* Prinsip *general least square* yaitu metode permodelan yang memprediksikan probabilitas kumulatifdari kategori yang ada.

1. Uji Keberartian Model

Jika variabel independen dimasukkan kedalam model, maka nilai 2 loglikelihood akan turun dan penurunan ini signifikan pada 0,001 yang berarti model dengan variabel independen lebih baik dibandingkan hanya model *intercept* saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model fit (Ghozali, 2006 : 97). Berikut adalah hasil Uji Keberartian Model variabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 4. 2
Hasil Pengujian Uji Keberartian Model Variabel Penelitian

Model Fitting Information

Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	21.501			
Final	.000	21.501	3	.000

Link function: Logit.

Sumber : Data Diolah SPSS 22.00

Berdasarkan tabel 4.2 di atas model lainnya dengan *intercept* saja menghasilkan nilai 2 loglikelihood sebesar 21,501, sedangkan jika variabel independen X_1, X_2, dan X_3 dimasukkan kedalam model ini, maka nilai 2 loglikelihood turun menjadi 0,000 dan penurunan ini signifikan pada 0,001 yang berarti model ini lebih baik dibandingkan hanya *intercept* saja. Jadi disimpulkan bahwa model fit.

2. Uji Kesesuaian Model

Uji kesesuaian model ini menunjukkan uji kesesuaian model dengan data. Jika signifikansi besar dari 0,05 hal ini berarti model sesuai dengan data empiris dan model layak digunakan. Berikut ini hasil Uji Kesesuaian Model variabel penelitian sebagi berikut :

Tabel 4. 3
Hasil Pengujian Uji Kesesuaian Model Variabel Penelitian

Goodness-of-Fit

	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	.130	22	1.000
Deviance	.256	22	1.000

Link function: Logit.

Sumber : Data Diolah SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan Uji Kesesuaian Model dengan data *Pearson* sebesar 0,130 dan nilai signifikan sebesar 1,000 besar dari 0,05 (1,000 > 0,05) dan *Devience* sebesar 0,256 dengan

signifikansi 1,000 besar dari 0,05 (1,000 > 0,05). Hal ini berarti model sesuai dengan data empiris dan model layak digunakan.

Tabel terkait dengan kesesuaian model adalah sebagai berikut : (Ghozali, 2006 : 98-99)

a. Tabel *Pseudo-Square*

Tabel *Pseudo-Square* menjelaskan variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam bentuk persentase. Berikut hasil pengujian Tabel *Pseudo-Square* variabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Hasil Pengujian Tabel *Pseudo R-Square* Variabel Penelitian

Pseudo R-Square

Cox and Snell	.972
Nagelkerke	1.000
McFadden	1.000

Link function: Logit.

Sumber : Data Diolah SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.4 diatas Tabel *Pseudo R-Square* mampu menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,972 atau sebesar 97,2% dan nilai Cox and Snell sebesar 1,000 atau sebesar 100%.

b. Tabel *Parameter Estimates*

Tabel *Parameter Estimates* dilihat dengan berpedoman kepada nilai Wald dan nilai signifikansinya. Dasar pengambilan keputusan dalam tabel *Parameter Estimates* adalah jika nilai signifikansi dari masing-masing Wald pada variabel X < 0,05 berarti terdapat pengaruh terhadap variabel dependen dari masing-masing variabel independen, sedangkan jika nilai signifikansi dari masing-masing Wald pada

variabel X > 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen dari masing-masing variabel independen. Berikut hasil pengujian *Tabel Parameter Estimates* variabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 4. 5
Hasil Pengujian *Tabel Parameter Estimates* Variabel Penelitian

Parameter Estimates

		Estimate	Std. Error	Wald	df	Sig.	95% Confidence Interval	
							Lower Bound	Upper Bound
Threshold	[Y = 7,139,449,240,000.00]	123.399	144.129	.733	1	.392	-159.089	405.886
	[Y = 7,552,749,700,000.00]	138.359	158.183	.765	1	.382	-171.674	448.392
	[Y = 7,955,069,560,000.00]	149.420	155.950	.918	1	.338	-156.236	455.076
	[Y = 8,355,071,580,000.00]	157.369	159.119	.978	1	.323	-154.499	469.238
	[Y = 8,783,098,090,000.00]	165.323	161.576	1.047	1	.306	-151.360	482.007
Location	X1	4.308E-10	3.580E-10	1.448	1	.229	-2.708E-10	1.132E-9
	X2	1.569E-10	2.265E-10	.480	1	.488	-2.870E-10	6.008E-10
	X3	-1.880E-11	4.309E-11	.190	1	.663	-1.032E-10	6.564E-11

Link function: Logit.

Sumber : Data Diolah SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.5 di atas diperoleh nilai Wald X1 sebesar 1,448 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,229 (0,229 > 0,05), nilai Wald X2 0,480 dengan nilai signifikansinya 0,488 (0,488 > 0,05), dan nilai Wald X3 sebesar 0,190 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,663 (0,663 > 0,05). Berarti semua nilai signifikansinya besar dari

0,05 (>0,05). Hal ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

c. Tabel *Test of Parallel Lines*

Tabel *Test of Parallel Lines* digunakan untuk asumsi bahwa semua kategori memiliki parameter yang sama atau tidak. Nilai yang diinginkan adalah tidak signifikan yaitu >0,05 yang berarti bahwa model cocok. Berikut hasil pengujian *Tabel Test of Parallel Lines* variabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 4. 6
Hasil Pengujian *Tabel Test of Parallel Lines* Variabel Penelitian

Test of Parallel Lines[a]

Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Null Hypothesis	.000			
General	.000[b]	.000	12	1.000

The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories.

a. Link function: Logit.

b. The log-likelihood value is practically zero. There may be a complete separation in the data. The maximum likelihood estimates do not exist.

Sumber : Data Diolah SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.6 di atas digunakan untuk menguji asumsi bahwa setiap kategori mempunyai parameter yang sama atau hubungan antara variabel independen dengan logit adalah sama untuk semua persamaan logit, dengan nilai signifikansinya sebesar 1,000 besar dari 0,05 (1,000 > 0,05) maka model yang dihasilkan parameter yang sama hingga sehingga penilaian *link function* dapat disimpulkan bahwa *link function*nya sesuai.

Dari hasil pengujian hipotesis regresi ordinal di atas, maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$\textit{Logit}\ \mathbf{Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3}$$

yaitu

$$\textit{Logit}\ (\mathbf{Y_0}) = 123{,}399 + 4{,}308E\text{-}10PAD + 1{,}569E\text{-}10DAU - 1{,}880E\text{-}11\ DAK$$

$$\textit{Logit}\ (\mathbf{Y_1}) = 138{,}359 + 4{,}308E\text{-}10PAD + 1{,}569E\text{-}10DAU - 1{,}880E\text{-}11\ DAK$$

$$\textit{Logit}\ (\mathbf{Y_2}) = 149{,}420 + 4{,}308E\text{-}10PAD + 1{,}569E\text{-}10DAU - 1{,}880E\text{-}11\ DAK$$

$$\textit{Logit}\ (\mathbf{Y_3}) = 157{,}369 + 4{,}308E\text{-}10PAD + 1{,}569E\text{-}10DAU - 1{,}880E\text{-}11\ DAK$$

$$\textit{Logit}\ (\mathbf{Y_4}) = 165{,}323 + 4{,}308E\text{-}10PAD + 1{,}569E\text{-}10DAU - 1{,}880E\text{-}11\ DAK$$

Dari persamaan di atas, mempunyai arti yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. $\textit{Logit}\ (\mathbf{Y_0}) = 123{,}399 + 4{,}308E\text{-}10PAD + 1{,}569E\text{-}10DAU - 1{,}880E\text{-}11\ DAK$
   a) a (Konstanta) = 123,399 *(Tabel Parameter Estimates)*

      Artinya, bahwa pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak ada atau dalam keadaan konstan atau nol, maka Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 0 sebesar 123,399 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan atau nol.

   b) X_1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 4,308E-10*(Tabel Parameter Estimates)*

      Artinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan ada pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpola positif. Apabila terjadi kenaikan pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0.0000000004308 dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

c) X_2 Dana Alokasi Umum (DAU) = 1,569E-10 *(Tabel Parameter Estimates)*

Artinya, Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan menunjukkan ada pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpola positif. Apabila terjadi kenaikan pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dalam satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0.0000000001569 dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

d) X_3 Dana Alokasi Khusus (DAK) = 1,880E-11 (*Tabel Paremetet Estimates)*

Artinya, Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan menunjukkan ada pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpola negative. Apabila terjadi kenaikan pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan sebesar -0.00000000001880 dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

2. ***Logit (*Y_1**) = 138,359+ 4,308E-10PAD + 1,569E-10DAU – 1,880E-11 DAK**

a) a (Konstanta) = 138,359 *(Tabel Parameter Estimates)*

Artinya, bahwa pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak ada atau dalam keadaan konstan atau nol, maka Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 1 sebesar 138,359 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan atau nol.

b) X_1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 4,308E-10*(Tabel Parameter Estimates)*

Artinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan ada pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpola positif. Apabila terjadi kenaikan pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam

satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0.0000000004308 dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

c) X_2 Dana Alokasi Umum (DAU) = 1,569E-10 *(Tabel Parameter Estimates)*

Artinya, Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan menunjukkan ada pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpola positif. Apabila terjadi kenaikan pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dalam satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0.0000000001569 dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

d) X_3 Dana Alokasi Khusus (DAK) = 1,880E-11 (*Tabel Paremetet Estimates)*

Artinya, Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan menunjukkan ada pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpola negative. Apabila terjadi kenaikan pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan sebesar -0.00000000001880 dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

3. ***Logit (*Y_2**) = 149,420+ 4,308E-10PAD + 1,569E-10DAU – 1,880E-11 DAK***

a) a (Konstanta) = 149,420 *(Tabel Parameter Estimates)*

Artinya, bahwa pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak ada atau dalam keadaan konstan atau nol, maka Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2 sebesar 149,420 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan atau nol.

b) X_1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 4,308E-10*(Tabel Parameter Estimates)*

Artinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan ada pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpola positif. Apabila terjadi kenaikan pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0.0000000004308 dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

c) X_2 Dana Alokasi Umum (DAU) = 1,569E-10 *(Tabel Parameter Estimates)*

Artinya, Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan menunjukkan ada pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpola positif. Apabila terjadi kenaikan pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dalam satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0.0000000001569 dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

d) X_3 Dana Alokasi Khusus (DAK) = 1,880E-11 (*Tabel Paremetet Estimates)*

Artinya, Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan menunjukkan ada pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpola negative. Apabila terjadi kenaikan pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan sebesar -0.00000000001880 dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

4. ***Logit (*Y_3**) = 157,369+ 4,308E-10PAD + 1,569E-10DAU – 1,880E-11 DAK***

a) a (Konstanta) = 157,369 *(Tabel Parameter Estimates)*

Artinya, bahwa pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak ada

atau dalam keadaan konstan atau nol, maka Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 3 sebesar 157,369 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan atau nol.

b) X_1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 4,308E-10*(Tabel Parameter Estimates)*

Artinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan ada pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpola positif. Apabila terjadi kenaikan pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0.0000000004308 dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

c) X_2 Dana Alokasi Umum (DAU) = 1,569E-10 *(Tabel Parameter Estimates)*

Artinya, Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan menunjukkan ada pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpola positif. Apabila terjadi kenaikan pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dalam satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0.0000000001569 dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

d) X_3 Dana Alokasi Khusus (DAK) = 1,880E-11 (*Tabel Paremetet Estimates)*

Artinya, Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan menunjukkan ada pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpola negative. Apabila terjadi kenaikan pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan sebesar -0.00000000001880 dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

5. ***Logit* (Y_4) = 165,323+ 4,308E-10PAD + 1,569E-10DAU – 1,880E-11 DAK**

   a) a (Konstanta) = 165,323 *(Tabel Parameter Estimates)*

      Artinya, bahwa pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak ada atau dalam keadaan konstan atau nol, maka Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 4 sebesar 165,323 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan atau nol.

   b) X_1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 4,308E-10*(Tabel Parameter Estimates)*

      Artinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan ada pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpola positif. Apabila terjadi kenaikan pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0.0000000004308 dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

   c) X_2 Dana Alokasi Umum (DAU) = 1,569E-10 *(Tabel Parameter Estimates)*

      Artinya, Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan menunjukkan ada pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpola positif. Apabila terjadi kenaikan pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dalam satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0.0000000001569 dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

   d) X_3 Dana Alokasi Khusus (DAK) = 1,880E-11 (*Tabel Paremetet Estimates)*

      Artinya, Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan menunjukkan ada pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpola negative. Apabila terjadi kenaikan pada variabel Dana Alokasi Khusus

(DAK) dalam satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan sebesar -0.00000000001880 dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam melakukan analisis data pada pembahasan ini, penulis menggunakan data kuantitatif yaitu data jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pertumbuhan Ekonomi yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belana Daerah (APBD) dan Laporan Statistik Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013-2018. Pada penelitian ini penulis mengolah data menggunakan aplikasi SPSS versi 22 untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar. Yang mana Pendapatan Asli Daerah (PAD)(X_1), Dana Alokasi Umum (DAU)(X_2), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)(X_3) menyebabkan perubahan terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi).

Dari pengolahan data yang telah penulis lakukan di atas menggunakan SPSS versi 22, maka dapat dilihat bahwa data yang telah diolah oleh penulis merupakan data yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan Uji Regresi Ordinal karena telah memenuhi Uji Keberartian Model dan Uji Kesesuaian Model.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengararuh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013-2018. Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel 4.5 yaitu *Tabel Parameter Estimates* diperoleh hasil bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) X_1 memiliki signifikansi sebesar 0,229 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa

hasil hipotesis 1 (H_1) ditolak. Artinya, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar.

Otonomi daerah memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri pendapatannya termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam pembiayaan kegiatannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang berfungsi untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Laju perekonomian di suatu daerah juga dipengaruhi oleh sarana prasarana di daerah tersebut, semakin baik fasilitas sarana dan prasarana di daerah tersebut maka akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan memberikan dampak pada perencanaan pembangunan daerah sehingga bila pembangunan daerah berjalan baik maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat dikatakan dengan peningkatan pendapatan asli daerah berarti mampu juga meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar jumlahnya sangat terbatas dan peningkatannya setiap tahun yang tidak begitu signifikan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja yang diperoleh Kabupaten Tanah Datar tidak cukup digunakan untuk

membangun kepentingan publik seperti membangun jalan, pasar, rumah sakit dan sarana prasarana lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dapat dilihat pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya selalu lebih kecil dibandingkan jumlah belanja modal yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan. Selain itu, ketergantungan Kabupaten Tanah Datar terhadap pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sangat tinggi sehingga Kabupaten Tanah Datar tidak bisa hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja untuk melakukan pembangunan. Sehingga masyarakat tidak merasakan dampaknya untuk keberlanjutan pembangunan daerah yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suandi (2016) memberikan hasil yang sama pada penelitian ini yaitu dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengararuh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013-2018. Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel 4.5 yaitu *Tabel Parameter Estimates* diperoleh hasil bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) X_2 memiliki signifikansi sebesar 0,488 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa hasil hipotesis 2 (H_2) ditolak. Artinya, bahwa Dana Alokasi Umum

(DAU) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat "Block Grant" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) ini salah satu dana perimbangan yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di daerah. Dan diharapkan dari pembangunan tersebut dapat berdampak terhadap laju Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut agar tidak terjadi ketimpangan fiskal. Untuk suatu daerah Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan kapasitas fiskal daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Akan tetapi di Kabupaten Tanah Datar peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima di Kabupaten Tanah Datar tidak digunakan untuk kegiatan yang bertujuan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Tanah Datar digunakan untuk membiyai belanja pegawai dan belanja modal. Namun, dapat dilihat pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar secara umum Dana Alokasi Umum (DAU) lebih banyak

dialokasikan untuk belanja pegawai dibandingkan untuk belanja modal yang digunakan untuk kegiatan pembangunan daerah. Sehingga peran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagian besar tidak digunakan untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar. Hal inilah yang menyebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Seharusnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah dialokasikan untuk belanja pembangunan sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi di Kabupaten Tanah Datar Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut dialokasikan untuk belanja rutin, sehingga alokasi tersebut tidak tepat sasaran. Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh tidak keseluruhan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya sebagian kecil saja yang digunakan. Itu pun terkadang untuk program-program atau kegiatan-kegiatan yang kurang memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Dewi (2017) memberikan hasil yang sama pada penelitian ini yaitu dimana Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengararuh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013-2018. Berdasarkan

hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel 4.5 yaitu *Tabel Parameter Estimates* diperoleh hasil bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) X_3 memiliki signifikansi sebesar 0,663 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa hasil hipotesis 3 (H_3) ditolak. Artinya, bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN, yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Dalam keadaan tertentu, Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun. Salah satu contoh kebutuhan khusus dan merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain : kebutuhan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigrasi primer.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Teknis terkait dan

Instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang berisi usulan-usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada Menteri Teknis oleh daerah tersebut. Bentuknya dapat berupa rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu atau dapat berbentuk dokumen program rencana pengeluaran tahunan dan multi tahunan untuk sektor-sektor serta sumber-sumber pembiayaannya.

Sasaran lokasi penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah jelas yang difokuskan untuk daerah tertinggal, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata. Adapun penentuan daerah tertentu tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi untuk masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (Pasal 55 PP No. 55/2005). Kriteria Khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria Teknis disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, dan tingkat kinerja pelayanan masyarakat serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Pemanfaatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi faktor penting dalam program pembangunan daerah. Jumlah Bidang Dana Alokasi Khusus

(DAK) meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Prasarana Jalan, Prasarana Irigasi, Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan,Kelautan dan Perikanan, Prasarana Pertanian, Prasarana Pemerintahan, Lingkungan Hidup, Kependudukan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana, Kehutanan, Sarana dan Prasarana Pedesaan, dan Perdagangan.

Adanya pembangunan di daerah akan mampu mendorong Pemda agar meningkatkan mutu kualitas pembangunan manusia yang secara otomatis berorientasi pada kesejahteraan publik. Jika Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan mengurangi kerusakan infrastruktur. Pembangunan daerah yang meliputi pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah sangat diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang sedang terjadi seperti mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pendidikan yang sangat rendah serta ketimpangan lainnya antar kabupaten/kota sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK), karena Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK) suatu daerah semakin tinggi tidak selalu semakin tinggi pula laju Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut. Dapat dilihat di Kabupaten Tanah Datar bahwa peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak sisertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Tanah Datar tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan

pembangunan. Tetapi Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut dibagi dua yaitu digunakan untuk kegiatan fisik atau disebut Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yaitu digunakan untuk kegiatan pembangunan yang dialokasikan kedalam belanja daerah yang sifatnya langsung dalam bentuk belanja modal dan untuk kegiatan non fisik atau disebut Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang digunakan untu kegiatan yang sifatnya operasioal seperti BOP PAUD, BOK KB, BOK Kesehatan Untuk Puskesmas dimana biaya tersebut sifatnya tidak untuk pembangunan.

Oleh karena Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut tidak diarahkan sepenuhnya pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik secara maksimal. Sehingga pembangunan tidak terajadi yang berakibat pada tidak berpengaruhnya Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siagian (2016) memberikan hasil yang sama pada penelitian ini yaitu dimana Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis data di atas diketahui secara simultan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013-2018. Secara keseluruhan jika dilihat dari tabel 4.2 yaitu *Tabel Model Fitting*

Information dan tabel 4.4 yaitu *Tabel Pseudo R-Square* secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang sangat besar yaitu 0,972 (97,2%) *(Tabel Pseud R-Square)* yang mana besarnya pengaruh tersebut ditandai dengan nilai signifikansi final dari data menunjukkan nilai sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,05 (0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 (H_4) diterima.

Artinya, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar. Jika variabel X tersebut dipisahkan, tidak ada satupun variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun, jika seluruh variabel X disatukan terjadilah pengaruh yang kuat terhadap Pertumbuhan Ekonomi yaitu sebesar 97,2%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan modal yang di miliki oleh pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan, yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut bisa di gunakan untuk pemenuhan kebutuhan daerah , sarana dan prasarana dalam mendorong pembangunan daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siswiyanti (2015) memberikan hasil yang sama pada penelitian ini yaitu dimana Pendapatan

Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 97,2%.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengujian, analisis data pembahasan hasil yang telah peneliti lakukan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengararuh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013-2018. Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel 4.5 yaitu *Tabel Parameter Estimates* diperoleh hasil bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) X_1 memiliki signifikansi sebesar 0,247 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa hasil hipotesis 1 (H_1) ditolak. Artinya, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengararuh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013-2018. Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel 4.5 yaitu *Tabel Parameter Estimates* diperoleh hasil bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) X_2 memiliki signifikansi sebesar 0,427 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa hasil hipotesis 2 (H_2) ditolak. Artinya, bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengararuh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013-2018. Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel 4.5 yaitu *Tabel Parameter Estimates* diperoleh hasil bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) X_3 memiliki signifikansi sebesar 0,162 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa hasil hipotesis 3 (H_3) ditolak. Artinya, bahwa Dana

Alokasi Khusus (DAK) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar.

4. secara simultan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013-2018. Secara keseluruhan jika dilihat dari tabel 4.2 yaitu *Tabel Model Fitting Information* dan tabel 4.4 yaitu *Tabel Pseudo R-Square* secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang sangat besar yaitu 0,972 (97,2%) *(Tabel Pseud R-Square)* yang mana besarnya pengaruh tersebut ditandai dengan nilai signifikansi final dari data menunjukkan nilai sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,05 (0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 (H_4) diterima. Artinya, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar diharapkan agar lebih mengembangkan potensi dan sektor-sektor ekonomi daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah agar lebih mandiri secara finansial dalam mendanai seluruh aktivitas pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir, serta memperbaiki tata kelola keuangan daerah dengan bijak, efektif dan efisien agar dapat menstimulus peningkatan

infrastruktur dan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum(DAU), dan Dana Alokasi Khusus(DAK) dengan sebijak mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan produktivitas publik.

2. Penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lainnya seperti dana bagi hasil, hibah, dan lainnya. Serta memperbanyak kabupaten/kota yang akan diuji dan mengambil sampel kabupaten/kota selain Tanah Datar, agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk kabupaten/kota tersebut. Dan penelitian berikutnya sebaiknya periode waktu penelitian hendaknya lebih diperpanjang untuk mengetahui kecerendungan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tanah Datar

Anggraini, Lucy. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Kota Bukittinggi. IAIN Batusangkar

Dewi, N. R., & Suputra, I. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.18.3*.

Gampito. (2016). *Perekonomian Indoesia dan Ekonomi Internasional.* Yogyakarta: STAIN Batusangkar Press.

Ikhsan, A., & dkk. (2018). *Teori Akuntansi*. Medan: MADENATERA.

Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka *Tanah Datar Regency in Figures 2018* . (2018). Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka *Tanah Datar Regency in Figures* 2019. (2019). Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar

Mulyadi. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 15 No.1*.

Putong, I. (2010). *Economics, Pengantar Mikro dan Makro.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Siagian, E., & Djazari, M. (2018). Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2010-2016. *Jurnal Fakultas Ekonomi*.

Siswiyanti, P. (2015). Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi, e-ISSN: 2502-6380*.

Suandi, Irmal. (2016). Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Universitas Negeri Makassar

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen.* Bandung: Alfabeta.

Sukirno, S. (2010). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tahar , A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah . *Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 12 No. 1*, 4.

Tambunan, T. T. (2011). *Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis dan Analisis Empiris.* (P. G. Indonesia, Ed.) Bogor: Ghalia Indonesia.

Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal . *Accounting Analysis Journal, ISSN 2252-6765*.

Widiasmoro, R. (2017). Analasis Perpaturan Kas, Perputaran, dan Perputaran Aset Lanca, dan Kas Berbanding Total Aktiva Terhadap Profitabilitas. *ISBN 978-602-60569-2-4*, 5.